

UPAYA PENINGKATAN IKLIM INVESTASI TERHADAP PELUANG KERJASAMA INVESTOR ANTAR DAERAH

S u k e s i
greenpct@yahoo.com

Ignatia Martha Hendrati
ignatia_martha@yahoo.com

ABSTRACT

Various attempts were made in order to attract regional investors. Both programs through licensing and incentive services performed. Nganiuk economic growth despite being below the economic growth in East Java Province level but, at the rate of economic growth in the District each year experience peningkatan Nganiuk. Economic growth is one factor to look at the rate of local consideration of the local economy the way in offering or attract investors to invest their capital. In 2004 the value of investment in Nganiuk a sharp decline compared with previous years since 2000 until 2004 the value of investments decreased an average of 12.92% every year however, inversely proportional to the value of productivity. The value of productivity always increase from year to year with an average increase of 6.72%. Nganiuk always formulate increased investment because of, first to find out how the current investment climate, and how to analyze prospective investments for Nganiuk and prospective investment in associate with several other districts. Through case studies and comparative studies using analytical techniques approach the potential, problems and development investment; technical analysis of procedures and licensing; technical analysis of investment management, engineering analysis of the opportunities for inter-regional cooperation; and techniques are recommended including investment policy analysis to improve investment climate to become more conducive, it is necessary to: Create a regulation of direct investment and local investment, and established regional investment teams with the involvement of Stakeholders

Keywords: *Potential Investment Opportunity of Regional : Climate Of Investment; Incentives*

* Dosen FE Unitomo Surabaya

** Dosen FE UPNV Jawa Timur

PENDAHULUAN

Propinsi Jawa Timur tempat paling strategis bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia, hal itu terbukti bahwa pertumbuhan ekonomi, inflasi, industri dinilai lebih baik dibandingkan dengan nilai nasional. Berdasarkan hasil kajian ekonomi regional yang dibuat oleh BI (Abdullah,16/12/2005) Jawa Timur termasuk wilayah yang dikategorikan cepat tumbuh dan cepat maju. Di dukung sektor perdagangan dan industri menjadi penggerak utama pertumbuhan tersebut.

Namun, pada kuartal 1 Juni 2006, pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur mengalami penurunan, apabila dibandingkan periode yang sama untuk tahun 2005. Adapun besar penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,36 %, dengan perincian bulan Januari sampai Juni 2006 sebesar 5,12% sedangkan tahun 2005 mencapai 5,48%. (BPS Jatim). Pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh

keterlambatan dalam pencairan dana dari pemerintah (Jawa Pos, 2 September 2006), sehingga berdampak pada kegiatan perekonomian di daerah-daerah di seluruh Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selama periode tahun 2005 berada di atas pertumbuhan perekonomian nasional, kecuali pada triwulan 1 tingkat pertumbuhan perekonomian nasional sebesar 6,3%. Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2005 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,98% yang didukung oleh kontribusi terbesar pada sektor perdagangan, hotel & restoran 2,74%.

Berbeda halnya dengan kondisi perekonomian di Kabupaten Nganjuk selama 4 tahun terakhir mulai tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 berada di bawah pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Pertumbuhan perekonomian merupakan salah satu faktor pertimbangan daerah untuk melihat laju jalannya ekonomi daerah dalam menawarkan atau menarik investor untuk menanamkan modalnya. Pada tahun 2004 nilai investasi di Kabupaten Nganjuk mengalami penurunan yang tajam dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya namun, berbanding terbalik dengan nilai produktifitasnya. Nilai produktifitas selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata kenaikan sebesar 6,72%. Di bawah ini dengan melihat penurunan nilai investasi artinya, adanya ke enggan atau minimnya investor menanamkan modalnya di Kabupaten Nganjuk, seperti dapat diamati dari realisasi nilai investasi, berikut:

Tabel 1. Nilai Investasi tahun 2000-2004

Jenis	Tahun (dalam Juta Rupiah)					
	2000	2001	2002	2003	2004	Kenaikan
Nilai Investasi	13.587,00	13.587,00	13.692,00	13.792,00	6.455,04	(12,92%)
Nilai Produksi	61.374,00	61.374,00	61.511,40	67.811,40	78.942,76	6,72%

Sumber: Kabupaten Nganjuk Dalam Angka

Pada Tabel 1 di atas menunjukkan kondisi nilai investasi dari Tahun 2000-2003 terus mengalami kenaikan, namun dari tahun 2003 ke tahun 2004 terjadi penurunan nilai investasi yang cukup drastis, hingga mencapai 50%. Secara keseluruhan dari tahun 2000 s/d 2004 nilai investasi mengalami penurunan rata-rata 12,92% setiap tahun.

Hal yang menarik diperhatikan adalah meskipun terjadi penurunan nilai investasi, namun tidak didukung dengan menurunnya nilai produksi. Sebagaimana terlihat pada Tabel 1 nilai produksi dari Tahun 2000-2004 terus menerus mengalami kenaikan dari tahun ketahun dengan kenaikan rata-rata sebesar 6,72%. Penurunan nilai investasi tidak signifikan dengan luas wilayah Kabupaten Nganjuk sebesar 122.433 ha. Hal ini memberikan peluang bagi Kabupaten Nganjuk untuk semakin meningkatkan pengolahan lahan khususnya di bidang pertanian. Peningkatan investasi, khususnya pada sektor pertanian, akan mempunyai dampak positif terhadap peningkatan produksi pertanian yang merupakan mata pencaharian pokok sebagian besar masyarakat Kabupaten Nganjuk. Peningkatan produksi bidang pertanian juga akan mempunyai multiplier efek terhadap sektor-sektor lain seperti industri, perdagangan, hotel, dan restoran serta sektor jasa lainnya.

Peningkatan nilai produksi berbanding lurus dengan peningkatan distribusi tenaga kerja yang terlibat dalam sektor tersebut, sehingga apabila terjadi peningkatan investasi pada berbagai sektor pembangunan, selain terjadi peningkatan produksi juga berpengaruh terhadap peningkatan penyerapan tenaga

kerja. Karena, pengembangan investasi untuk berbagai sektor akan membutuhkan tenaga kerja produktif yang memadai. Dengan demikian pengembangan investasi ini akan menciptakan kesempatan kerja dan berusaha serta menambah lowongan kerja baru, yang pada gilirannya akan dapat mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten Nganjuk.

Merupakan suatu tantangan bagi Kabupaten Nganjuk untuk memberikan kesempatan kerja kepada tenaga kerja yang telah tersedia, dan memanfaatkan nilai produksi yang terus meningkat. Tantangan tersebut akan dapat dihadapi salah satu diantaranya adalah dengan menjalin kerjasama atau menarik investor untuk mengoptimalkan nilai produksi, hasil pertanian yang semakin meningkat dan memberdayakan tenaga kerja produktif yang tersedia.

Dari gambaran di atas, menunjukkan kondisi investasi yang ada di Kabupaten Nganjuk tidak kondusif namun, tidak diikuti rendahnya nilai produksi. Adapun sektor yang menjadi andalan dan menyerap banyak tenaga kerja di Kabupaten Nganjuk adalah sektor pertanian dengan salah satu produk unggulannya adalah bawang merah. Di samping itu, hal penting diperhatikan yang mempengaruhi iklim investasi di satu daerah juga dipengaruhi oleh iklim investasi di daerah lain, khususnya daerah terdekat yang mempunyai potensi dan unggulan serupa dengan Kabupaten Nganjuk yang berbasis pertanian. Beberapa pertanyaan perlu dijawab melalui penelitian ini antara lain : 1) Bagaimana kondisi iklim investasi di Kabupaten Nganjuk saat ini ?, 2) Investasi apa yang memiliki prospek menjanjikan untuk dikembangkan di Kabupaten Nganjuk ?, 3) Investasi prospektif apa yang dapat dikerjasamakan dengan Kabupaten Nganjuk ?

KAJIAN PUSTAKA

Landasan Hukum

Beberapa landasan hukum sebagai dasar dalam penelitian peningkatan iklim investasi di Kabupaten Nganjuk adalah:

Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 1 tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing. BAB IX Kerja Sama Modal Asing dan Modal Nasional; Pasal 23:

- (1) Dalam bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing dapat diadakan kerja sama antara modal asing dengan modal nasional dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 3.
- (2) Pemerintah menetapkan lebih lanjut bidang-bidang usaha, bentuk-bentuk dan cara-cara kerjasama antara modal asing dan modal nasional dengan memanfaatkan modal dan keahlian asing dalam bidang ekspor serta produksi barang dan jasa-jasa.

Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal dalam Negeri. BAB III BIDANG USAHA; Pasal 4:

- (1) Semua bidang usaha pada dasarnya terbuka bagi swasta. Kegiatan negara yang bersangkutan dengan pembinaan bidang usaha swasta meliputi pula bidang-bidang yang perlu dipelopori atau dirintis oleh Pemerintah.
- (2) Bidang usaha negara meliputi terutama bidang-bidang yang pengusahaannya wajib dilaksanakan oleh pemerintah.

Pembangunan Ekonomi

Menurut Adam Smith, pembangunan ekonomi berdimensi luas yaitu pertumbuhan bahwa faktor kelembagaan, politik dan alam dalam suatu kelompok sosial (bangsa) mengalami laju pertumbuhan ekonomi tertentu yang tercipta karena naiknya jumlah mereka dan melalui tabungan. Hal ini mendorong meluasnya pasar yang pada gilirannya meningkatkan pembagian kerja dan dengan demikian meningkatkan produktifitas.

Pembagian kerja adalah titik permulaan dari teori pertumbuhan ekonomi terkait dengan produktifitas tenaga kerja. Smith selanjutnya mengemukakan kenaikan produktifitas kerja yang meliputi:

- a. Ketrampilan kerja;
- b. Penghematan waktu dalam memproduksi barang;
- c. Penemuan mesin yang sangat menghemat tenaga; dan
- d. Kenaikan produktifitas berasal dari modal dan besarnya pasar (perluasan perniagaan dan perdagangan internasional) bukan dari tenaga kerja.

Akan tetapi, dengan meningkatnya jumlah penduduk dan fasilitas transport akan terjadi pembagian kerja yang semakin luas dan peningkatan modal yang semakin besar.

Berbeda halnya dengan teori Smith, teori Ricardian tentang pembangunan ekonomi yang melandaskan pada: 1) orientasi pada tanah (pertanian menentukan distribusi industri), 2) "*law of diminishing return*" berlaku bagi tanah, 3) Persediaan tanah adalah tetap, 4) Permintaan produk pertanian (gandum) inelastis, 5) Buruh dan modal bersifat variabel, 6) Keadaan pengetahuan teknis bersifat tertentu (*given*), 7) Buruh dibayar dengan standard upah minimal, (8). Harga penawaran buruh tertentu dan tetap, 9) Permintaan buruh tergantung pada pemupukan modal, 10) Terdapat persaingan yang sempurna, 11) Pemupukan modal dihasilkan dari keuntungan.

Kriteria Investasi Yang Tepat sebagai Modalitas Kebijakan Investasi.

Menurut Smith, investasi dilakukan karena pemilik modal mengharapkan untung, dan harapan masa depan keuntungan bergantung pada iklim investasi pada hari ini dan pada keuntungan nyata.

Berbagai macam kriteria investasi itu sebagai berikut:

- a. *Produktivitas Marginal Sosial*. Menurut Galenson dan Leibenstein, Hollis Chenery dan Khan dalam Jhingan (1975), menyebut kriteria ini sebagai pedoman kebijaksanaan. Beberapa asas penuntun kriteria ini ialah:
 - 1) Investasi harus diarahkan pada penggunaan yang paling produktif sehingga rasio *output* uang (*current output*) terhadap investasi menjadi maksimum atau sebaliknya rasio modal-*output* menjadi minimum.
 - 2) Investasi harus dilakukan terhadap proyek yang akan memanfaatkan buruh secara maksimum, dalam hal ini rasio buruh-investasi maksimum.
 - 3) Proyek investasi itu harus diseleksi sehingga menghasilkan barang yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan ekonomi eksternal lebih luas.
 - 4) Proyek investasi adalah proyek yang dirancang paling banyak menggunakan bahan baku dalam negeri dan berbagai suplai lain.
 - 5) Proyek investasi tersebut harus diseleksi sehingga dapat memperbaiki distribusi pendapatan nyata.
 - 6) Investasi harus diarahkan pada industri yang menghemat devisa, mengurangi beban neraca pembayaran dan memaksimumkan rasio barang ekspor terhadap investasi.

b. Overhead Ekonomi

Menurut Young dan Rosentein-Rodan, investasi harus dapat menciptakan ekonomi eksternal dalam bentuk pengembangan sumber bahan bakar dan tenaga, sumber bahan baku pada umumnya, fasilitas kredit, penelitian dan angkutan, dan sebagainya. Dari sisi permintaan, investasi harus menciptakan *overhead* sosial dan ekonomi yang luas dalam bentuk rumah sakit, sekolah, jalan raya, jalan kereta api, gedung, bendungan, dan lain-lain. Kategori investasi seperti itu dapat meningkatkan produktivitas *dan Sosial*.

c. *Pertumbuhan berimbang*

Menurut Jhingan (1975) mengungkapkan bahwa pertumbuhan berimbang memerlukan keseimbangan antara berbagai industri barang konsumsi dan antara industri barang konsumsi dan barang modal. Keseimbangan juga diperlukan antara investasi dibidang industri dan investasi dibidang pertanian, karena pertanian dan industri bersifat saling melengkapi. Kenaikkan *output* dibidang industri memerlukan kenaikan *output* dibidang pertanian. Jika *output* dan lapangan kerja meningkat di sektor industri, kenaikan ini akan menyebabkan naiknya permintaan akan bahan mentah dan bahan makanan. Jika sektor pertanian tidak berhasil meningkatkan persediaannya, inflasi akan terjadi.

d. *Pilihan Teknologi*

Pilihan dalam teknik produksi juga mempengaruhi jumlah dan pola investasi. Apakah pilihannya jatuh pada teknik produksi yang bersifat padat-modal atau padat-karya tergantung pada tujuan sosial dan tujuan ekonomi.

e. *Rasio Modal Output*

Berbagai ahli ekonomi menganjurkan rasio modal-*output* sebagai satu kriteria investasi. Di dalam menjatuhkan pilihan terhadap berbagai proyek investasi dan di dalam menentukan prioritas, rasio modal-*output* dari berbagai proyek harus dibandingkan. Investasi harus dibatasi pada proyek-proyek yang memperkecil rasio modal-*output*. Apabila rasio modal-*output* proyek investasi X adalah 3 : 1 dan rasio proyek Y adalah 5 : 1, maka investasi pada proyek X harus mendapatkan prioritas. Semakin rendah rasio modal out put, semakin tinggi tingkat laju pertumbuhan perekonomian tersebut.

Selanjutnya, dikemukakan oleh Kindleberger dalam Jhingan (1975) bahwa, sosio-budaya masyarakat haruslah dirubah jika pembangunan diharapkan dapat berjalan. Organisasi sosial seperti keluarga, kasta, warna kulit, dogma agama dan kehidupan desa harus dimodifikasi sehingga selaras dengan pembangunan. Oleh karena, perubahan sosial budaya harus diperkenalkan dengan metoda secara bertahap, misalnya melalui pendidikan dan contoh tauladan.

Kemudian persyaratan administrasi memegang peranan penting dalam investasi. Administrasi yang kuat, berwibawa, dan tidak korup, merupakan *sine qua non* pembangunan ekonomi. Kebutuhan akan pemerintahan yang bersih dalam pembangunan ekonomi secara singkat dijelaskan oleh Finer dalam Jhingan (1990), Pembangunan ekonomi memerlukan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai pedoman dan memberikan kepastian tentang keuntungan yang sepadan dengan usaha dan pengorbanan seperti dijanjikan oleh program pembangunan.

Menurut Jhingan (1975), tidak ada satu kriteria investasi yang bersifat objektif, sederhana dan tepat. Cara yang terbaik adalah menemukan keseimbangan di antara macam-macam kriteria.

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Jenis data penelitian yang dikumpulkan adalah data primer yang diperoleh melalui observasi atau interview, dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari laporan-laporan, meliputi: PDRB, income perkapita, ketenagakerjaan, Partisipasi Angkatan Kerja, laporan masing-masing dinas terkait tentang investasi.

Metode Analisis

Hasil dari penelitian dianalisis dengan statistik deskriptif dan tabulasi berdasarkan kunjungan ke sejumlah instansi terkait yang dijadikan obyek

penelitian. Adapun lingkup materi yang dijadikan dalam kegiatan penelitian ini adalah:

- a. Analisis potensi, permasalahan dan pengembangan investasi dan komoditi unggulan meliputi kegiatan:
 - Identifikasi potensi dan permasalahan (*mapping*) investasi per sektor nilai produksi di Kabupaten Nganjuk.
 - Identifikasi potensi, permasalahan dan pengembangan komoditi unggulan per jenis komoditi per sektor nilai produksi.
- b. Analisis terhadap prosedur dan perijinan dalam iklim investasi meliputi kegiatan:
 - Identifikasi dan inventaris prosedur
 - Identifikasi dan inventaris persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat agar memperoleh pelayanan inventasi sesuai yang diinginkan
- c. Analisis terhadap manajemen investasi meliputi kegiatan:
 - Identifikasi efektifitas kelembagaan investasi
 - Identifikasi efektifitas pemasaran investasi
 - Identifikasi profesionalisme sumberdaya manusia
- d. Analisis terhadap teknologi produksi meliputi kegiatan:
 - Identifikasi kondisi yang ada tingkat kesulitan teknologi produksi per sektor nilai produksi
 - Identifikasi tingkat keberagaman masyarakat dalam penerimaan teknologi
- e. Analisis terhadap peluang kerjasama antar daerah atau kabupaten dalam investasi meliputi kegiatan:
 - Identifikasi investasi bahan atau produk
 - Identifikasi kebijakan investasi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan PDRB Kabupaten Nganjuk

Semakin membaiknya kondisi ekonomi secara nasional berdampak positif pula terhadap perekonomian di Kabupaten Nganjuk. Hal ini dapat ditunjukkan oleh semakin meningkatnya PDRB Kabupaten Nganjuk. PDRB Kabupaten Nganjuk atas dasar harga berlaku, pada Tahun 2001 sebesar Rp. 3.282.188,66 juta dan meningkat menjadi Rp. 469.744,49 pada Tahun 2005 atau mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 13% setiap tahun. Secara lebih terinci perkembangan PDRB Kabupaten Nganjuk selama periode 2001 s/d 2005 seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku

	Lapangan Usaha	2001	2002	2003	2004	2005	PERTUMB.
1	Pertanian	1,166,538.33	1,256,933.22	1,337,851.37	1,457,596.00	1,671,193.20	9.45%
2	Pertamb. Dan Galian	58,557.56	64,456.67	72,196.07	78,470.77	89,680.20	11.26%
3	Industri Olahan	302,865.82	324,693.38	346,404.67	387,822.86	455,284.23	10.81%
4	Listrik, Gas Dan Air Bersih	12,033.79	15,307.94	19,855.02	25,588.71	30,604.55	26.35%
5	Bangunan	82,261.85	86,938.97	91,239.39	100,771.81	114,437.90	8.66%
6	Perdag, Hotel Dan Rest.	1,113,474.60	1,320,265.45	1,551,372.47	1,792,850.03	2,172,295.31	18.20%
7	Angkutan & Komu Nikasi	73,233.56	84,821.39	96,655.19	109,625.10	134,381.95	16.44%
8	Keuangan	133,736.80	152,992.14	171,916.02	190,984.92	221,897.91	13.51%
9	Jasa – Jasa	339,486.34	395,197.83	436,080.72	498,338.29	579,975.23	14.35%

Lapangan Usaha	2001	2002	2003	2004	2005	PERTUMB.
A. Pemerintahan Umum	194,926.68	222,881.90	250,237.97	294,967.35	345,011.15	15.36%
B. Swasta	144,559.66	172,315.93	185,842.75	203,370.94	234,964.08	13.00%
Total Pdrb	3,282,188.66	3,701,607.00	4,123,570.91	4,642,048.49	5,469,744.49	13.65%

Sumber: PDRB Kabupaten Nganjuk Tahun 2005

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir Total PDRB berdasarkan harga berlaku terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun dengan kenaikan rata-rata sebesar 13,65% setiap tahun. Sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah sektor listrik, gas dan air bersih dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 26,35% setiap tahun. Sedangkan sektor yang mengalami pertumbuhan paling rendah adalah sector bangunan dengan pertumbuhan sebesar 8,66% setiap tahun. Sektor pertanian yang merupakan mata pencarian pokok sebagian besar masyarakat Kabupaten Nganjuk hanya mengalami pertumbuhan sebesar 9,45% setiap tahun.

Sedangkan dilihat dari kontribusinya terhadap pembentukan Total PDRB, terdapat dua sector yang mempunyai peranan besar dalam pembentukan PDRB. Kedua sector tersebut adalah sector pertanian dan sector perdagangan hotel dan restoran. Gambaran secara lebih terinci perkembangan kontribusi masing-masing sektor selama kurun waktu Tahun 2001 hingga Tahun 2005 seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Kontribusi Masing-Masing Sektor Terhadap Total PDRB

Lapangan Usaha	2001	2002	2003	2004	2005
1 Pertanian	35.54%	33.96%	32.44%	31.40%	30.55%
2 Pertamb. Dan Penggalian	1.78%	1.74%	1.75%	1.69%	1.64%
3 Industri Pengolahan	9.23%	8.77%	8.40%	8.35%	8.32%
4 Listrik, Gas Dan Air Bersih	0.37%	0.41%	0.48%	0.55%	0.56%
5 Bangunan	2.51%	2.35%	2.21%	2.17%	2.09%
6 Perdag, Hotel Dan Rest.	33.92%	35.67%	37.62%	38.62%	39.71%
7 Angkutan Dan Komunikasi	2.23%	2.29%	2.34%	2.36%	2.46%
8 Keuangan	4.07%	4.13%	4.17%	4.11%	4.06%
9 Jasa – Jasa	10.34%	10.68%	10.58%	10.74%	10.60%
a. Pemerintahan Umum	5.94%	6.02%	6.07%	6.35%	6.31%
b. Swasta	4.40%	4.66%	4.51%	4.38%	4.30%
Total PDRB	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: PDRB Kabupaten Nganjuk Tahun 2005, diolah

Berdasarkan tabel tersebut di atas terlihat bahwa terdapat dua sektor lapangan usaha yang mempunyai peranan sangat besar dalam pembentukan PDRB di Kabupaten Nganjuk. Kedua sektor lapangan usaha tersebut adalah sektor pertanian dan sektor perdagangan hotel dan restoran. Kedua sektor tersebut memberikan kontribusi lebih dari 60% dalam pembentukan PDRB di kabupaten Nganjuk. Namun dari kedua sektor tersebut selama kurun waktu lima tahun terakhir telah terjadi pergeseran dalam memberikan kontribusi terhadap total PDRB, yakni semakin menurunnya peranan sektor pertanian dan semakin meningkatnya peranan sektor perdagangan hotel dan restoran.

Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Secara kuantitas jumlah penduduk Kabupaten Ngajuk terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2005 jumlah penduduk Kabupaten Ngajuk lebih dari 1 juta jiwa, yakni sebanyak 1.049.690 jiwa. Dari jumlah

tersebut sebanyak 734.241 merupakan penduduk usia kerja. Jumlah penduduk usia kerja sebanyak 734.241 tersebut yang menjadi angkatan kerja sebanyak 540.569 dan sisanya bukan angkatan kerja. Sedangkan kesempatan kerja dari seluruh sektor kurang lebih sebanyak 505.689 jiwa. Dengan demikian antara penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja yang ada masih lebih banyak jumlah angkatan kerja dengan selisih 34.880 jiwa. Secara lebih terinci perkembangan penduduk dan tenaga kerja selama kurun waktu 2000 s/d 2005 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Kependudukan Dan Ketenagakerjaan

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Penduduk Usia Kerja	Penduduk Angk. Kerja	Kesemp. Kerja	Selisih 6 - 5
1	2000	972,630	684,330	453,259	432,370	(20,889)
2	2001	975,818	668,568	456,699	444,840	(11,859)
3	2002	976,585	676,871	467,309	436,414	(30,895)
4	2003	1,028,940	701,690	524,753	491,876	(32,877)
5	2004	1,038,832	716,911	532,371	497,181	(35,190)
6	2005	1,049,690	734,241	540,569	505,689	(34,880)
	Kenaikan	1.55%	1.44%	3.67%	3.30%	

Sumber: PDRB Kabupaten Nganjuk Tahun 2005, diolah

Kabupaten Nganjuk sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pertanian, dan sebagaimana besar penduduknya juga mempunyai mata pencarian dalam bidang pertanian. Meskipun dilihat dari kontribusinya terhadap pembentukan PDRB, sektor pertanian makin tahun makin mengalami penurunan namun dari sisi penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian masih merupakan sektor yang paling banyak memberikan kesempatan kerja dibandingkan sektor-sektor yang lain. Selama lima tahun terakhir (2001 s/d 2005) sektor pertanian masih mendominasi dalam memberikan peluang kesempatan kerja. Dari kesempatan kerja yang ada lebih dari 50% berada pada sektor pertanian. Secara lebih terinci pertumbuhan kesempatan kerja masing-masing sektor seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Pertumbuhan Kesempatan Kerja Menurut Sektor

Sektor	2001	2002	2003	2004	2005	Pertum
Pertanian	237,663	200,738	261,933	263,266	266,165	4%
Pertamb & Galian	510	2,098	2,593	2,465	2,350	81%
IndustrPengolahan	49,071	39,228	40,977	43,444	46,405	-1%
Listrik, gas & air	510	1,206	312	633	601	40%
Konstruks/ Bangn	13,485	19,213	8,737	7,800	6,982	-8%
Perdagangan	78,552	98,777	102,098	103,915	106,656	8%
Angkutan	15,813	17,220	18,904	20,018	21,251	8%
Keuangan	4,251	3,771	3,060	3,034	3,021	-8%
Jasa-jasa	44,985	54,170	53,262	52,605	52,258	4%
Total	444,840	436,421	491,876	497,180	505,689	3%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja

Potensi Investasi di Kabupaten Nganjuk

a. Sektor Pertanian

Hingga saat ini sektor pertanian masih menjadi salah satu sektor andalan di Kabupaten Nganjuk. Adapun jenis-jenis komoditas yang mempunyai potensi investasi untuk dikembangkan adalah sebagai berikut:

1) Bawang Merah

Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu produsen bawang merah di Jawa Timur dan menjadi salah satu produk unggulan Kabupaten Nganjuk. Produksi bawang merah yang dihasilkan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2005 jumlah produksi bawang merah dari Kabupaten Nganjuk sebanyak 78.206,50 Ton. Adapun daerah penghasil bawang merah di Kabupaten Nganjuk ini antara lain: Kecamatan Gondang, Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Bagor, Kecamatan Wilangan dan Kecamatan Rejoso.

Dipilihnya bawang merah sebagai produk unggulan Kabupaten Nganjuk karena selain sebagai penghasil bawang merah di Propinsi Jawa Timur, dan para petani bawang merah tersebut secara tehnik telah cukup mampu dalam melakukan budidaya bawang merah.

Untuk menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar yang harus diderita oleh serta terciptanya iklim usaha yang kondusif pemerintah perlu menciptakan iklim investasi melalui usaha mempertemukan antara petani dan pedagang, melalui kebijakan bersifat teknis atau operasional. Persoalan yang tidak kalah pentingnya adalah komitmen terhadap ketetapan Kabupaten Nganjuk berbasis pertanian, untuk itu perlu diberdayakan sektor pertanian agar mampu menghasilkan produk yang mempunyai daya saing. Komoditi pertanian selain bawang merah adalah tembakau, tebu dan jagung.

Untuk menjaga kestabilan harga jual bawang merah ditingkat petani, sehingga petani tidak mengalami kerugian pada saat panen raya, maka kedepan perlu dipikirkan investasi yang dapat mengolah bawang merah menjadi produk setengah jadi/produk jadi sehingga dapat menampung pemasaran hasil produksi petani pasca panen.

Secara kelembagaan, pembentukan sentra-sentra berdasarkan kolektifitas kelompok dan terikat dalam jejaring diatur dalam keputusan bupati. Dengan mengakomodir pengaturan tentang:

- a) Kerjasama kelompok tani, pengusaha dan pemerintah yaitu mengatur tentang jenis pertanian yang akan ditanam di wilayah tertentu sesuai dengan kebutuhan pasar.
- b) Pemerintah memfasilitasi bibit yang dibutuhkan dengan memperhatikan *cost and benefit*; pupuk ; membangun jaringan pemasaran diluar pengusaha lokal; pemerintah menetapkan standard kualitas mutu produk bersama-sama petani dan pengusaha;
- c) Menjaga struktur harga agar petani dapat sejahtera; dan

2) Jagung

Selain bawang merah, komoditas pertanian tanaman pangan lain yang potensial adalah tanaman jagung. Selama lima tahun terakhir produksi jagung di Kabupaten Nganjuk terus menerus mengalami kenaikan. Luas areal tanaman jagung setiap tahunnya tidak kurang dari 25.000 Ha dengan produksi lebih dari 1.500 ton setiap tahun. Pada tahun 2005 luas panen sebanyak 31.195 Ha dengan produksi sebanyak 1.851 Ton.

Dengan melihat produksi jagung yang cukup tinggi di Kabupaten Nganjuk, sangat potensial untuk melakukan investasi dalam bentuk industri yang dapat mengolah jagung menjadi produk jadi atau setengah jadi. Dengan pengolahan dari bahan baku jagung menjadi produk jadi/setengah jadi, selain meningkatkan nilai tambah juga dapat menambah kesempatan kerja baru. Adapun jenis industrinya misalnya: industri makanan kecil dari jagung, industri tepung jagung, dan sebagainya.

3) Perkebunan Tebu

Tanaman tebu merupakan potensi besar bagi Kabupaten Nganjuk diharapkan mampu menyerap tenaga kerja di sektor pertanian, mempertimbangkan Kabupaten Nganjuk memiliki 1 pabrik gula Lestari wilayah Timur, pabrik gula Mrican wilayah Selatan, dan pabrik gula Rejoagung Madiun di wilayah Barat. Adapun potensi tanaman tebu juga didukung oleh keberadaan pabrik gula lintas wilayah kabupaten terlihat di Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro.

4) Perkebunan Jarak

Semakin langkanya sumber energi yang berasal dari minyak dan gas bumi, perlu dicari alternatif sumber energi lain yang dapat menggantikan/mengurangi ketergantungan pada migas. Salah satu dari sekian banyak sumber energi alternatif adalah minyak pelumas yang berasal dari bahan baku tumbuh-tumbuhan.

Salah satu jenis tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan baku minyak pelumas adalah tanaman jarak. Kabupaten Nganjuk yang sebagian wilayahnya merupakan kawasan hutan mempunyai potensi yang tinggi untuk budidaya tanaman jarak. Budidaya tanaman jarak dengan menggunakan lahan tegakan di wilayah perhutani, merupakan salah satu potensi investasi di Kabupaten Nganjuk yang perlu dipertimbangkan.

b. Sektor Industri

1) Industri Rokok

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan petani tembakau adalah melalui pendirian industri rokok. Dengan adanya pabrik rokok akan dapat menampung produksi tembakau dari petani sehingga akan mendongkrak harga tembakau di tingkat petani. Selain itu, dengan adanya industri rokok juga akan menambah kesempatan kerja dan berusaha di Kabupaten Nganjuk sehingga akan dapat mengurangi pengangguran. Agar kualitas dan kuantitas produksi tembakau yang dihasilkan oleh petani sesuai dengan kebutuhan industri rokok pemerintah harus memainkan peranannya sebagai fasilitator yang dapat mempertemukan petani tembakau dengan para pengusaha rokok.

Peluang investasi industri rokok di Kabupaten Nganjuk cukup menggembirakan. Hal ini ditandai semakin meningkatnya pabrik rokok di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2006 mencapai 186 pabrik rokok NPWKC dengan menyerap tenaga kerja setiap pabrik 300 orang.

Peluang investasi dapat dilihat dari:

- a) Jumlah pengurusan ijin rata-rata 10 setiap bulan
- b) Produksi rokok dibutuhkan 1 juta untuk kategori industri kecil
- c) Pemasaran di Jawa dan luar Jawa sudah ada jaringan, seperti: Donggala, Medan, Ujung Pandang dan Mataram. Jaringan pemasaran Sidoarjo – Ponorogo – Surabaya. Sistem Pemasaran dengan sistem: (a). Konsinyasi 2 : 1, (b). Pola cash
- d) Propek pengembangan pabrik rokok oleh karena rokok merupakan kebutuhan sehari-hari dan dikonsumsi oleh masyarakat menengah keatas (daya beli masyarakat terhadap rokok sangat tinggi).
- e) Kesiapan bahan baku

2) Industri Kecil Handy Craft (Buah Tangan)

Salah satu potensi yang dapat ditawarkan ke investor adalah pengelolaan *handy craft*. Ketersediaan *handy craft* (buah tangan) sangat penting untuk membantu pengembangan investasi sektor pariwisata. Karena Handy Craft merupakan salah satu unsur yang dapat menunjang pengembangan sektor

pariwisata. Handy Craft dapat digunakan sebagai kenang-kenangan (oleh-oleh) wisatawan yang sedang mengunjungi obyek-obyek wisata di Kabupaten Ngajuk.

3) Industri Suttle Cock

Industri suttle cock di Kabupeten Nganjuk ini sudah berkembang cukup lama bahkan, sudah terbentuk sentra industri. Kualitas hasil produksi suttle cock ini sudah cukup baik. Namun demikian identitas produk tersebut tidak banyak diketahui oleh masyarakat di luar Ngajuk. Karena produksi yang dihasilkan dijual tanpa menggunakan merek. Pengusaha yang menampung hasil produksi suttle cock tersebut bersedia membeli jika tidak ada merek. Kemudian pengusaha tersebut memberi merk dagang untuk di jual ke pasar. Sehingga, masyarakat luas lebih mengenal merk dagang pengusaha yang memasarkan produk tersebut, dan kurang mengenal sentra produksinya.

c. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Dalam kurun waktu liha tahun terakhir sektor perdagangan hotel dan restoran di Kabupaten Nganjuk berkembang cukup pesat dan mempunyai kontribusi (sumbangan) yang makin tinggi terhadap pembantuan PDRB Kabupaten Nganjuk. Semenjak tahun 2002 Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran merupakan sektor yang paling tinggi sumbangannya terhadap Total PDRB. Sektor ini telah mengalahkan sektor pertanian yang pada tahun-tahun sebelumnya merupakan sektor yang dominan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Nganjuk.

Dilihat dari aspek geografis, Kabupaten Nganjuk mempunyai letak yang strategis yang berada di persimpangan Kabupaten Madiun dan Jombang serta Kabupaten Kediri dan Kabupaten Bojonegoro. Dengan posisi seperti ini, sebetulnya sangat potensial pengembangan sektor perdagangan hotel dan restoran. Karena Kabupaten akan banyak dilewati oleh lalu lintas orang dan barang sehingga, potensi mengembangkan sektor perdagangan, hotel dan restoran sangat terbuka. Salah satu cara untuk dapat meningkatkan sektor perdagangan hotel dan restoran adalah dengan cara mendorong agar masyarakat Kabupaten Nganjuk lebih mencintai Kabupaten Nganjuk dengan cara membelenajakan uang di Kabupaten Nganjuk, sehingga kegiatan sektor perdagangan akan berkembang lebih pesat.

Sarana penunjang yang perlu mendapat perhatian untuk pengembangan sektor perdagangan hotel dan restoran adalah sarana angkutan dan prasarana jalan. Untuk itu infrastruktur sarana jalan dan penerangan jalan mutlak harus ditingkatkan sebagai upaya promosi langsung bagi investor untuk tertarik mengalokasikan dananya di Kabupaten Nganjuk, khususnya perdagangan hotel dan restoran.

Analisis Aspek Pendukung Peningkatan Iklim Investasi

a. Aspek Kelembagaan dan Proses Pengurusan Perijinan

Untuk menarik agar investor mau menanamkan modalnya di Kabupaten Nganjuk Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah melakukan perubahan-perubahan dalam bidang Kelembagaan Perijinan yaitu dengan menerbitkan Perda Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kantor-Kantor Daerah di Kabupaten Nganjuk. Semenjak dikeluarkan Perda No. 8 Tahun 2002 tersebut seluruh perijinan ditangani oleh satu lembaga yaitu Kantor Perijinan. Namun dalam implementasinya Perda ini belum berjalan maksimal dan masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan. Adapun kendala-kendala tersebut antara lain:

1) Tugas dan wewenang

Tabel 6. Jenis Perijinan

No	Jenis Ijin	Wewenang
1	Ijin Gangguan (HO)	Bupati
2	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	Bupati
3	Ijin Mendirikan Rumah Sakit	Bupati
4	Ijin Penjualan Minuman Beralkohol	Bupati
5	Ijin Merubah Status Tanah sawah (S) ke darat (D) atau sebaliknya	Bupati
6	Ijin Reklame (Besar)	Bupati
7	Ijin Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C	Bupati
8	Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah	Dinas Terkait
9	Ijin Penggunaan Gedung Milik daerah	Dinas Terkait
10	Ijin Pemakaian sarana Olah Raga	Dinas Terkait
11	Ijin Penyelenggaraan Hiburan Umum	Dinas Terkait
12	Ijin Usaha Bidang Kepariwisataaan	Dinas Terkait
13	Ijin Usaha Huller	Dinas Terkait
14	Ijin Mendirikan Apotik swasta	Dinas Terkait
15	Ijin Mendirikan Lab. Klinik dan Lab. Kesehatan swasta	Dinas Terkait
16	Ijin Mendirikan Optikal Swasta	Dinas Terkait
17	Ijin Mendirikan Balai Pengobatan dan BKIA Swasta	Dinas Terkait
18	Ijin Mendirikan Rumah Bersalin Swasta	Dinas Terkait
19	Ijin Praktek Kedokteran Umum dan Kedokteran Gigi Swasta	Dinas Terkait
20	Ijin Kerja Keperawatan	Dinas Terkait
21	Ijin Praktek Swasta	Dinas Terkait
22	Ijin Praktek swasta Kebidanan	Dinas Terkait
23	Ijin Usaha Pemotongan Ternak Swasta	Dinas Terkait
24	Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)	Dinas Terkait
25	Ijin Usaha Industri (IUI)	Dinas Terkait
26	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Dinas Terkait

2) Waktu Proses Perijinan

Proses perijinan sering melebihi target waktu yang ditentukan dalam lembar persyaratan perijinan. Hal ini disebabkan adanya persyaratan tambahan di luar ketentuan yang berlaku, sehingga masalah ini memerlukan waktu yang cukup lama. Seperti ijin HO harus melampirkan hasil uji Lab.

3) Pembayaran Ijin

Pembayaran semua jenis ijin yang tidak satu pintu, masalah ini dianggap memberatkan bagi pemohon. Sebab diluar ketentuan jumlah pembayaran masih ada pungutan lain ketika survey di lapangan. Sebaiknya, pembayaran semua jenis ijin langsung ke Bank atau Kas Daerah. Sehingga besar pembayaran dan kemana harus membayar lebih transparan dan menjamin tidak ada pembayaran lain diluar ketentuan pembayaran.

4) Pelayanan

Perihal pelayanan perijinan di kabupaten Nganjuk, masih perlu banyak pembenahan guna meningkatkan kualitas/mutu pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan Prima belum berjalan sepenuhnya. Sebab pelayanan

di kantor perijinan masih terbebani oleh target PAD sehingga, berakibat pada pelayanan yang dianggap oleh masyarakat (pemohon) kurang memuaskan. Oleh sebab itu, target ini harus dirubah menjadi target utama atau Prioritas utama adalah kualitas pelayanan, dengan kualitas pelayanan (cepat, tepat, memuaskan) secara otomatis target PAD akan terpenuhi.

b. Teknologi Informasi

Salah satu faktor penunjang yang akan mempengaruhi masuknya investasi ke suatu daerah adalah Teknologi Informasi yang digunakan untuk mengkomunikasikan potensi daerah kepada para investor/calon investor.

Dalam kaitannya dengan teknologi informasi ini, selama ini untuk mengkampanyekan potensi daerah kepada calon investor, sarana yang digunakan oleh Kabupaten Nganjuk masih konvensional yakni, hanya menggunakan brosur dan mengikuti pameran. Brosur yang digunakan belum didesain dengan bagus sehingga, kurang menarik bagi investor.

c. Infrastruktur

Infrastruktur merupakan salah satu faktor yang juga dipertimbangkan oleh investor ketika akan menanamkan modalnya ke suatu. Umumnya investor akan lebih tertarik pada daerah yang telah memiliki sarana dan prasarana penunjang investasi yang memadai. Infrastruktur penunjang invesatsi ini antara prasarana sarana jalan dan sarana transportasi, ketersediaan air, energi listri, serta sarana komunikasi.

Agar investor tertarik untuk menginvestasikan dananya, selain memperbaiki aspek-aspek yang lain, infrastruktur penunjang ini juga harus dikembangkan. Agar investor tidak mengalami kesulitan dalam mencari lokasi untuk investasi, pemerintah perlu segera mengembangkan kawasan industri. Dengan penyediaan kawasan industri dilengkapi dengan sarana penunjang lainnya diharapkan investor tertarik untuk menanamkan modalnya di kabupaten Nganjuk.

d. Peningkatan Iklim Investasi

Salah satu dasar yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan pola investasi adalah dengan mendasarkan pada PDRB Kabupaten Nganjuk. PDRB di Kabupaten Nganjuk sebagaimana terlihat pada tabel sebelumnya menunjukkan bahwa sektor perdagangan hotel dan restoran menempati posisi pertama dalam memberikan sumbangan terhadap PDRB dengan kontribusi sebesar 38,62%. Posisi kedua adalah sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 31,40%. Sedangkan sektor industri dan pengolahan menempati urutan keempat dengan kontribusi sebesar 8,35% dibawah sektor jasa-jasa yang menempati urutan ketiga dengan kontribusi sebesar 10,74%.

Perhatian terhadap pengurangan jumlah pengangguran dari 34.880 orang Tahun 2006 dan tingkat pertumbuhan pengangguran cukup tinggi akan menjadi bahan pertimbangan jenis atau bentuk investasi yang diharapkan di Kabupaten Nganjuk. Dengan memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana, serta sumber daya lain yang dimiliki, terdapat beberapa yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk agar dapat meningkatkan iklim investasi menjadi lebih kondusif, yang meliputi antara lain:

1) Pola Kemitraan Incubator

Salah satu kegiatan meningkatkan iklim investasi melalui penanaman nilai kewirausahaan pada masyarakat sesuai dengan keahlian di bidangnya masing-masing.

2) Pola Pengembangan Kelembagaan

Untuk meyakinkan investor agar tertarik menanamkan modalnya di Kabupaten Nganjuk, perlu dibentuk kelembagaan (Tim Investasi Daerah) di dalamnya terdiri dari instansi terkait antara lain: Koperindag, Bappeda,

Kantor perijinan, lembaga keuangan dan Pokja (Perwakilan pengusaha). Tugas dari Tim ini adalah menyusun program, implementasi, monitoring dan evaluasi program.

Tim Investasi Daerah harus lebih agresif (menjemput bola) terhadap investasi yang akan masuk di Kabupaten Nganjuk, memberikan kemudahan bagi para investor untuk menanamkan modalnya. Ijin yang terkait dengan investasi dapat dilaksanakan secara cepat, mudah, biaya proporsional sesuai dengan ketetapan.

3) Pelayanan Perijinan yang Kondusif

Hasil temuan di beberapa daerah kajian komparasi, ditemukan bahwa Kabupaten Sidoarjo mengutamakan insentif iklim investasi di Kabupaten Sidoarjo melalui pelayanan perijinan satu atap, terdapat 15 jenis ijin yang telah dijadikan satu kedalam satu Dinas Perijinan dan Penanaman Modal.

Pelayanan prima menjadi misi bagi instansi tersebut dan dalam kinerjanya ditentukan oleh kemampuan menarik investor sebanyak-banyaknya. Untuk itu, lembaga ini didesain berbeda dengan lembaga lainnya, mulai dari seragam yang dikenakan sampai dengan teknik pelayanan yang diberikan oleh pelaksana kepada masyarakat. Dinas ini melaksanakan tugasnya berdasarkan ISO 9000 (standarisasi pelayanan memuat ketentuan waktu penyelesaian dan kemudahan pelayanan serta transparansi biaya). Untuk meningkatkan iklim investasi perlu komitmen pemerintah dengan memperhatikan deregulasi perijinan, khususnya transparansi biaya “.

4) Pemberdayaan Masyarakat

Salah satu tujuan mengelola investasi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat kecil (petani gurem, pengangguran). Penciptaan lapangan kerja merupakan program jangka pendek semua kabupaten/kota. Untuk itu pemanfaatan lahan-lahan atau pengelolaan aset daerah untuk kepentingan publik perlu mendapat perhatian yang serius. Pemetaan aset dan pengelolaan atas aset dilakukan secara bertanggung jawab demi kesejahteraan rakyat. Sebagai contoh, petani gurem dapat melaksanakan kegiatan hidupnya dengan mengerjakan lahan pertanian kerjasama dengan ADM, akan tetapi seberapa besar dan keberlanjutan dari pemberdayaan masyarakat menjadi ukuran keberhasilan proses pemberdayaan dan penciptaan lapangan kerja.

5) Pengembangan Pola Pendanaan

Percepatan investasi juga dipengaruhi oleh pola pendanaan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dana dari lembaga keuangan (perbankan) dapat digunakan pengusaha yang memiliki jaminan dan keberlanjutan usahanya, bagi industri kecil atau home industri beberapa program yang dapat digunakan sebagaimana telah dilaksanakan yaitu: pendanaan bagi UKMK melalui Bank Jatim. Bank Jatim merencanakan membentuk BPR didaerah guna membiayai jenis usaha menengah keatas dengan besar.

Pengadaan dana dalam bentuk stimulan, dari dana APBD I dan APBD II dengan pengembalian lunak, dibutuhkan dalam peningkatan iklim investasi. Kemampuan menyerap dana dari masyarakat dan di kelola oleh lembaga koperasi menjadi prioritas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Iklim investasi di Kabupaten Nganjuk belum kondusif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain:
 - Biaya pengurusan perijinan kurang transparan, proses penyelesaian terlalu lama.
 - Infrastruktur kurang mendukung
 - Keamanan berinvestasi kurang terjamin.
 - Sarana sosialisasi potensi dalam rangka mendukung investasi masih minim
 - Kelembagaan belum kondusif
- b. Berdasarkan kemampuan dalam penyerapan tenaga kerja dan pemetaan wilayah maka, jenis investasi yang mempunyai prospek untuk dikembangkan adalah:
 - Sektor pertanian berupa komoditas bawang merah, tembakau dan tebu.
 - Sektor industri berupa industri kecil rokok.

Saran

- a. Untuk meningkatkan iklim investasi agar menjadi lebih kondusif maka, perlu dilakukan:
 - Membuat Perda tentang Penanaman modal dan investasi daerah
 - Membentuk tim investasi daerah dengan melibatkan *Stakeholder* (Pemerintah, Swasata dan Masyarakat) dalam rangka mempercepat/ akselerasi penanaman modal dan investasi.
- b. Untuk mendukung keberlanjutan pengembangan komoditas unggulan terdapat beberapa hal yang dilakukan yaitu:
 - Membangun pasar induk agrobis di tingkat kabupaten sehingga dapat menampung komoditas pertanian.
 - Membuat kebijakan tentang pola tanam tebu untuk mempertahankan kontinuitas produksi tebu dari waktu ke waktu.
- c. Untuk mendukung pengembangan sentra-sentra industri, perlu peningkatan infrastruktur penunjang yang meliputi:
 - Pengembangan sarana jalan
 - Penyediaan/pengembangan armada angkutan.
 - Peningkatan kapasitas energi listrik
- d. Dalam rangka untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang ada di Kabupaten Nganjuk dan Daerah sekitarnya terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Ngajuk dengan Instansi lain, yaitu kerjasama dengan Perhutani dalam rangka:
 - Pengembangan tanaman jarak yang digunakan sebagai bahan bakar bio-diesel
 - Memanfaatkan potensi bahan baku marmer yang terdapat di wilayah Perhutani.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Moch . Arsjad., Keiji Omura. 1994 *Local Development In Indonesia*. LPEM- UI Dan IDE (Tokyo). Jakarta.
- Charles P. Kindlekerger, *Economic Development*
- Harian Pagi. Jawa Pos, 2 September 2006
- Jhingan, M. L. 1993. *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan. (The Economics Of Development And Planning)*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Kamaludin, Rustian. 1999. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Penerbit FE.UI.. Jakarta
- Lewis, W. Arthur. 1980. *Dasar-Dasar Perencanaan Ekonomi Negara. (The Principles Of Economic Planing)*. Penerit PT. Bhratara Karya Aksara. Jakarta

- Rosyidi, Suherman, 1994, *Pengantar Teori Ekonomi*, Jakarta.
- Schum Peter, J. A, *Therry of Economic Development*
- Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan : Problemantika Dan Pendekatan*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta .
- Sukirno, Sadono, 1996, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Edisi Kedua, PT. Raja Grafindo, Persada, Jakarta.
- Suparmoko, M, 2000, *Pengantar Ekonomikan Makro*, Edisi Keenam, Penerbit BPFE, UGM Yogyakarta.
- Van Adams, Arvil. , Robert Goldfarb & Terence Kelly. 1992, *How The Macroeconomic Environment Affects Human Resources Development*. The Worl Bank. Washington, DC